

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah merupakan ilmu yang berhubungan dengan manusia, ruang, waktu, dan tempat. Sejarah sering dihubungkan dengan peristiwa masa lalu, namun tidak semua peristiwa masa lalu bisa direkonstruksi sebagai sejarah, karena sejarah merupakan hasil dari rekonstruksi masa lalu. Peristiwa sejarah atau masa lalu bukan hanya membahas mengenai manusianya itu sendiri tetapi ruang, waktu dan tempat menjadi salah satu objek kajian sejarah.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi artinya pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali. Sehingga rekonstruksi sejarah ini berhubungan dengan historiografi atau penulisan sejarah. Dalam buku pengantar ilmu sejarah karangan Kuntowijoyo Historiografi ini mempunyai perjalanan yang panjang mulai dari zaman Yunani dan Romawi sampai sekarang. Di zaman sekarang penulisan sejarah lebih dikenal dengan sebutan sejarah kritis dan sejarah baru. Penulisan sejarah ini bukan hanya terbatas terhadap objek manusianya saja tetapi, wilayah atau tempat bisa dijadikan sebagai objek kajian dari sejarah. Sebuah wilayah atau daerah tentu mempunyai ceritanya masing-masing, mulai dari awal mulanya kemudian sampai terbentuknya daerah tersebut.²

Wilayah merupakan satuan unit geografi yang yang mempunyai batasan dan bagian-bagian tertentu. Pada dasarnya sebuah wilayah terbentuk karena adanya aktivitas manusia maupun alam. Dalam hal ini, pembentukan sebuah wilayah yang mempunyai batas-batas didasari karena manusianya maupun oleh alam, artinya ada yang beranggapan bahwa manusia ikut terlibat dalam membuat batas wilayah itu sendiri. Dan ada juga yang berpendapat bahwa wilayah itu terbentuk sendirinya dan secara alamiah batas-batas itu terbentuk.³

¹ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan, vol. 1 (Yogyakarta: Tiara wacana, 2018). Hal 14

² Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan, vol. 1 (Yogyakarta: Tiara wacana, 2018). Hal 29-32

³ Ilham Mirzaya Putra, Pengembangan Wilayah, Jurnal Bumi Lestari, 1st ed., vol. 14 (Medan: Cv Prokreatif, 2023). Hal 2-5

Di Indonesia sendiri wilayah ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang mana wilayah-wilayah di Indonesia diatur oleh pemegang kekuasaan. Wilayah ini terbagi menjadi perkotaan dan pedesaan. Kota pada awalnya merupakan sebuah desa yang seiring berjalanya waktu terus mengalami perubahan-perubahan sehingga terbentuk menjadi sebuah kota.⁴ Berdasarkan periodisasinya kota ini bisa diklasifikasikan kedalam beberapa macam pertama Kota Bersejarah, kota prasejarah ini bisa dibilang menjadi awal mula terbentuknya aktivitas manusia pada masa lalu kemudian dari aktivitas tersebut berubah menjadi pemukiman dan terbentuklah sebuah wilayah perkotaan. Kedua, Kota Tradisional, kota Tradisional ini biasanya identik dengan awal mula kerajaan, ataupun di Jawa sendiri biasanya kota tradisional ini lebih dikenal dengan keraton. Ketiga, Kota Kolonial, Kota kolonial ini biasanya ditandai dengan pemerintah yang berkuasa, yang mana kota ini dijadikan sebagai kota administrasi bagi pemerintah kolonial, bahkan aturan dan undang-undang yang berlaku juga hasil dari pemerintah tersebut. Keempat, Kota Modern, Kota Modern ini ditandai dengan bangunan-bangunan yang lebih modern serta dalam pembagian pemukiman didasarkan pada kelas sosial. Bahkan tidak jarang orang dengan kelas sosial yang lebih tinggi ditempatkan di wilayah yang lebih strategis guna membantu mengembangkan infrastruktur kota tersebut.⁵

Sehingga dalam hal ini wilayah perkotaan ini dirasa perlu untuk dikaji mengenai sejarahnya. Salah satu tempat atau wilayah yang mempunyai perjalanan panjang dalam sejarah adalah Tasikmalaya. Tasikmalaya merupakan sebuah wilayah yang ada di daerah Jawa Barat, nama Tasikmalaya ini dulunya bernama Sukapura kemudian pada tahun 1913 berganti nama menjadi Tasikmalaya oleh Raden Adipati Aria Wiratanuningrat.⁶ Pada zaman pemerintahan kolonial pada abad ke-17 berdirilah sebuah pemerintahan yang bernama Sukapura dengan Ibukotanya adalah Leuwiloa. Pemerintahan di Sukapura dipimpin oleh seorang bupati Ki ngabehi wirawangsa, yang kemudian setelah itu digantikan oleh J. Manggala dst. Ibukota dari Sukapura ini sempat berpindah-pindah karena alasan tertentu. Ibukota yang asalnya dari Leuwiloa kemudian berpindah ke Empang yang berada di Sukaraja, kemudian dari Empang berpindah kembali ke Manonjaya. Kemudian

⁴ Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2016. Hal 32

⁵ Ilham Daeng Makkelo, "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis," *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 12, no. 2 (2018), doi:10.34050/JLB.V12I2.3052.

⁶ Purwadi, "Sejarah Kabupaten Tasikmalaya," *Garda.Id*, January 5, 2004.

pada 01 Oktober 1901 ibukota yang awalnya dari Manonjaya kembali berpindah ke Tasikmalaya yang sekarang menjadi pemerintahan Kota Tasikmalaya.⁷

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota otonom di daerah Jawa Barat, pada awalnya kota Tasikmalaya merupakan Ibukota dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum menjadi daerah perkotaan, wilayah ini dulunya menjadi kota administratif dari kabupaten Tasikmalaya. Kota Administratif merupakan sebuah wilayah yang dipakai untuk keperluan administrasi politik namun masih dibawah naungan pemerintah Kabupaten.

Seiring dengan berkembangnya perkotaan, kegiatan di pedesaan sejak abad ke-20 mulai bergeser ke perkotaan. Perubahan sosial yang terjadi di perkotaan cenderung lebih cepat dibanding dengan pedesaan, bahkan perubahan sosial yang terjadi di pedesaan cenderung tidak nampak. Perubahan inilah yang menjadi sorotan baik itu dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi.⁸

Pada awal 1980 dan 1990-an Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Soeharto biasa dikenal dengan zaman orde baru. Pada periode ini ditandai dengan keseimbangan politik namun sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintahan pusat. Ciri utama dari kebijakan pada masa orde baru adalah pemerintahan pusat mengambil alih setiap kebijakan yang ada di daerah maupun provinsi yang kemudian nanti disetujui oleh pemerintahan pusat, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang dilakukan di daerah baik pemerintahan kabupaten/kota diawasi ketat oleh pemerintahan pusat.

Dalam misi pembangunan nasional periode orde baru ini bisa dibilang mengatur setiap pembentukan pemerintah daerah, salah satunya adalah kebijakan mengenai status pemerintahan kota Administratif. Kota Administratif merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat namun kota Administratif ini tidak mempunyai kewenangan dan pemerintahan sendiri dikarenakan masih di bawah naungan kabupaten.⁹

Berbeda dengan kota Madya yang mempunyai pemerintahan sendiri seperti DPRD dan pemimpin daerah yang disebut dengan Walikota serta mempunyai wilayah yang cukup luas, kota Administratif ini tidak mempunyai wilayah yang luas serta pemerintahnya sendiri

⁷ Suyitno Anan, Bunga Rampai Jawa Barat, vol. 1991 (Bandung: Yayasan Citra Nusantara, 1991). Hal 72

⁸ Ruth McVey and Harold Crouch, "The Army and Politics in Indonesia.," Pacific Affairs 53, no. 2 (1980), doi:10.2307/2757512.

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah," Pub. L. No. 5, 1 (1974).

konsekuensinya adalah setiap kebijakan dan pembangunan kota tergantung terhadap pemerintahan kabupaten

Pada dekade awal 1990-an, ditemukan bahwa sejumlah daerah Administratif dirasa kurang efektif berjalanya dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta dirasa perlu adanya pembangunan yang lebih merata disetiap daerah Administratif. Dalam hal ini pemerintah daerah merasa perlu adanya peningkatan status kota Administratif ini menjadi kota Madya agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah Tasikmalaya.¹⁰

Tasikmalaya memiliki sejarah yang kaya sebagai tempat penting dalam bidang budaya, perdagangan, dan pemerintahan di wilayah Timur Priangan, Jawa Barat. Sebelum menjadi kota mandiri, Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah Tasikmalaya yang lebih luas, yang mencakup area perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan catatan sejarah, Tasikmalaya sudah dikenal pada masa kolonial Belanda sebagai pusat kantor pemerintahan dan tempat penjualan produk pertanian. Lokasi strategisnya di rute selatan Jawa menjadikannya titik hubung antara pantai selatan, wilayah Priangan, dan rute menuju Jawa Tengah. Sebelum 1993, ekonomi Tasikmalaya didukung oleh perdagangan, kerajinan, dan pertanian. Kota ini terkenal dengan batik Tasik khususnya, kerajinan bambu, dan bordir yang dijual di wilayah lain. Situasi ini menarik perdagangan dari daerah sekitar, membantu pasar besar berkembang dan mempercepat pembangunan layanan kota.

Dari sudut pandang sosial, masyarakat Tasikmalaya sangat religius, dengan banyak pesantren Islam dan kegiatan keagamaan. Tradisi ini bercampur dengan nilai-nilai tradisional Sunda, menciptakan identitas lokal yang unik. Namun, pertumbuhan populasi kota yang cepat mulai menimbulkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan perumahan, sekolah modern, dan sistem transportasi yang baik.¹¹

Perubahan Tasikmalaya dari kota Administratif menjadi kota otonom pada tahun 2001 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, serta peraturan nasional. Antara tahun 1993 dan 1998, Tasikmalaya mengalami peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin sulit dikelola. Namun, karena hanya

¹⁰ O. D. Van Den Muijzenberg and Pauline Dublin-Milone, "Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts.," *Pacific Affairs* 39, no. 3/4 (1966), doi:10.2307/2754316.

¹¹ Z Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (LP3ES, 2011), hal 25

berstatus kota Administratif, Tasikmalaya tidak memiliki banyak kewenangan, sehingga banyak tugas pemerintahan kota masih sangat bergantung pada wilayah Tasikmalaya yang lebih luas. Situasi ini kemudian memicu keinginan Tasikmalaya untuk menjadi lebih mandiri.

Selain itu, masalah ekonomi dan situasi politik nasional pada tahun 1997 hingga 1998, serta berakhirnya pemerintahan Orde Baru, sangat mempengaruhi daerah-daerah. Peraturan tentang pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memungkinkan pembentukan daerah otonom baru. Tasikmalaya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong perubahan statusnya. Akhirnya, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Tasikmalaya secara resmi dinobatkan sebagai kota otonom dengan walikota yang sesungguhnya.

Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara pengelolaan, tetapi juga politik dan sejarah. Secara politik, penetapan Tasikmalaya sebagai kota otonom memberikan kesempatan bagi warga kota untuk mengurus urusan mereka sendiri dengan lebih bebas. Secara ekonomi, status kota otonom memungkinkan Tasikmalaya mendapatkan dana lebih besar dan mempercepat pembangunan fasilitas kota. Sementara itu, dalam hal sosial dan budaya, status otonom Tasikmalaya membantu memperkuat identitas komunitas Priangan Timur sebagai bagian dari Jawa Barat, dengan budaya agama yang unik dan perubahan modern yang terjadi.¹²

Kota Administratif pada zaman orde baru berada di tingkatan Dati II yang mana tinggalkan ini berada di bawah naungan kabupaten. Kemudian untuk tingkat Dati I ini berada di bawah pemerintahan provinsi. Kota Tasikmalaya ini pada awalnya merupakan daerah atau kota Administratif yang ditetapkan pada tahun 1976 pada masa pemerintahan bupati Tasikmalaya yaitu A. Bunyamin. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan pada puncaknya pada tahun 2001 kota Tasikmalaya secara resmi terpisah dari kabupaten Tasikmalaya dan berganti status yang awalnya dari kota Administratif menjadi kotamadya.

Dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji studi ilmiah dengan judul **SEJARAH PERUBAHAN KOTA TASIKMALAYA DARI KOTA ADMINISTRATIF MENJADI KOTAMADYA TAHUN 1993-2007**

¹² Y Iskandar, Sejarah Jawa Barat: Yuganing Rajakawasa (Geger Sunten, 1997), hal 15

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang melatarbelakangi pemekaran wilayah Tasikmalaya menjadi kota dan kabupaten?
2. Bagaimana kronologi Sejarah Perubahan kota Tasikmalaya dari kota Administratif menjadi kotamadya tahun 1993-2007?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pemekaran wilayah Tasikmalaya menjadi kota dan kabupaten
2. Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilalui dalam sejarah perubahan Kota Tasikmalaya dari kota Administratif menjadi kotaMadya tahun 1993-2007

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitiannya seorang sejarawan biasanya mengenal topik-topik kajian yang akan diteliti melalui wawasan yang didapatkannya dari membaca. Sehingga dengan membaca peneliti akan mudah dalam mencari topik bahkan ketika sudah mendapat topik peneliti juga bisa mempunyai wawasan sesuai dengan topiknya.¹³

Tujuan kajian pustaka ialah agar dapat di buktikan keaslian terhadap suatu penelitian serta memperoleh bahasan penelitian objek tersebut perlu untuk dilakukan. Untuk itu seorang peneliti sejarah perlu kiranya melakukan kajian pustaka terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya baik berupa Buku, Jurnal, dan Skripsi yang menjadi acuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Ebed Hamri dkk “Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya” (Jurnal Ekonomi dan Sosial)

Pada jurnal ini menjelaskan dampak kebijakan pemekaran daerah tahun 2001 terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya sebagai pusat regional Priangan Timur, dengan penekanan pada indikator-indikator ekonomi pasca-pembentukan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah kajian ini bersifat evaluatif-ekonomi dan berorientasi pada konsekuensi jangka menengah panjang setelah kota berdiri sementara penelitian penulis bersifat historis prosedural, merekonstruksi tahap-tahap legislasi yang dimulai dari tahun 1993

¹³ H Sjamsuddin and Penerbit Ombak, Metodologi Sejarah (Penerbit Ombak, 2020), hal 22

2. Fitriyani Yuliawati, Subhan Agung “Sengketa Aset Pasca Pemekaran Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya” (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan)

Pada penelitian ini Mengkaji konflik pembagian aset seperti tanah, gedung, keuangan, dan pegawai antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai warisan langsung dari proses pemekaran UU No. 10 Tahun 2001, dengan perspektif ilmu pemerintahan dan resolusi konflik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah kajian ini menyoroti fase transisi dan konflik awal pasca-pengesahan undang-undang (2001–2003), dengan pendekatan analisis konflik Administratif. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pada titik pengesahan legislasi itu sendiri, tanpa membahas implementasi atau sengketa aset, dan mengandalkan narasi kronologis berbasis dokumen arsip.

3. Falah Miftahul, Nina Herlina L, Kunto Sofianto. “Morfologi Kota-kota di Priangan Timur pada Abad ke XX-XXI; Studi Kasus Kota Garut, Ciamis dan Tasikmalaya” Jurnal Patanjala Vol. 9 No. 1 Maret 2017

Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana morfologi perkotaan dari segi infrastruktur dan bangunan-bangunan di dalamnya, serta berfokus bukan hanya pada satu daerah saja, melainkan tiga daerah sekaligus. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih berfokus pada satu objek yaitu kota Tasikmalaya.

4. Agus Budiman, Ryan Ardiansyah. “Perpindahan Ibukota Kabupaten dari Sukaraja ke Manonjaya serta Dampaknya (1828-1834) Jurnal Artefak

Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana perpindahan Ibukota kabupaten Sukapura sebelum berganti nama menjadi Tasikmalaya dari yang awalnya Surakaraja kemudian berpindah ke Manonjaya. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah jurnal ini lebih berfokus pada Tasikmalaya sebelum adanya kota dan kabupaten sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana proses kota Tasikmalaya berdiri yang awalnya kota Administratif menjadi kotaMadya.

5. Yoga Setya Permana “Pengaruh Perubahan Status Kota terhadap Perkembangan Kota Tasikmalaya” (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada)

Pada penelitian ini menjelaskan transformasi sosial-ekonomi dan Administratif Kota Tasikmalaya setelah berubah dari status kota Administratif

menjadi kota otonom penuh, dengan analisis perbandingan sebelum dan sesudah 2001. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengevaluasi dampak perubahan status dalam kurun waktu yang lebih panjang sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada momen historis spesifik tahun 2001, dengan pendekatan rekonstruktif prosedural yang menekankan mekanisme negara, bukan perkembangan kota setelahnya.

E. Metode Penelitian

Penelusuran fakta tentang suatu fakta tentang kehidupan yang dulu pada dasarnya memfokuskan kepada masa lalu. Pengkajian ini berusaha memfokuskan dan merekonstruksi bagaimana sebuah kota Tasikmalaya ini bisa berdiri. Dalam proses menelusuri data harus dikerjakan dengan teratur supaya dapat menangkap, Menggambarkan, memaparkan, serta memaknai apa yang terjadi di masa lalu.

Dalam penelitian ini menggunakan MPS (Metode penelitian Sejarah) untuk menganalisa dengan objektif data yang sudah di dapat dan metode ini terdiri dari 4 Tahap yakni, Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

1. Heuristik

Tahapan heuristik adalah tahapan pertama dalam pencarian sumber, dilakukan guna mendapatkan data. Kegiatan yang diarahkan pada tahapan ini adalah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber baik sumber yang terdapat di tempat ataupun sumber lisan serta tulisan, sumber yang di dapat kadangkala berupa benda, manuskrip maupun sumber lisan.¹⁴

Tahapan heuristik ini adalah tahapan awal, pada tahapan ini penulis menelusuri, melacak, menganalisis data dan sumber yang ditemukan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Penelusuran yang penulis lakukan tidak hanya mencari sumber primer primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian tetapi juga mencari sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Dalam tahapan heuristik ini juga penulis mencari sumber tertulis berupa dokumen dan arsip dengan mendatangi Dispusipda kota Tasikmalaya yang mana disana penulis menemukan sumber yang mendukung untuk penulisan skripsi. Sesudah menjajaki sumber yang berhubungan di lokasi keberadaan sumber peneliti mendapat

¹⁴ Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah; Teori, Metode, Dan Contoh Aplikasi, Metodologi Penelitian Sejarah, 2014. Hal 93-95

beberapa sumber. Sumber sumber ini kemudian penulis klasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Dibawah ini adalah sumber-sumber yang penulis dapat dari berbagai sumber yakni:

a. Sumber Primer.

Dalam mencari sumber primer ini peneliti menemukan mendapat pelaku yang kemudian nantinya bisa diwawancara serta peneliti juga mendapatkan arsip mengenai proses pemisahan kota Tasikmalaya dari kabupaten. Diantara sumber-sumber tersebut diantaranya:

1. Sumber Tulisan/Arsip

- 1) Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tingkat II Tasikmalaya nomor: 130/sk.04-DPRD/1994 mengenai persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kotamadya daerah tingkat II Tasikmalaya
- 2) Surat dari Gubernur kepada DPRD tingkat I Jawa Barat dengan nomor 130/1225/otda mengenai persetujuan dewan dalam rangka usul pembentukan Kotamadya dati II Tasikmalaya
- 3) Keputusan DPRD propinsi dati I Jawa Barat nomor: 130/sk-10/DPRD/1994 tentang persetujuan pembentukan Kotamadya dati II Tasikmalaya
- 4) Surat dari Bupati Tasikmalaya kepada ketua DPRD Tasikmalaya yang berisi mengenai permohonan penataan kota Tasikmalaya dengan no surat 130/142/Tapem 31 Januari 2000
- 5) Surat Keputusan DPRD kabupaten Tasikmalaya mengenai persetujuan penataan kabupaten Tasikmalaya dengan nomor 3 tahun 2000
- 6) Keputusan bersama Bupati dan pimpinan DPRD kabupaten Tasikmalaya dengan nomor 131/KEP 194. TAPEM/ 2000
- 7) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat mengenai usul penataan kota daerah otonom menjadi kabupaten dan kota dengan nomor surat 135.1/1302/Tapem tahun 2000

- 8) Surat Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada MENDAGRI mengenai usul peningkatan status kota Administratif menjadi daerah Kota dengan nomor surat 135.1/1918/ctda tahun 2000
- 9) SK DPRD Jawa Barat mengenai persetujuan pembentukan kota Tasikmalaya dengan nomor 135.1/kep.DPRD 31/2000
- 10) Surat Sekjen DPR RI kepada anggota DPR RI dengan nomor surat RU.01/1724/DPR RI/2001 perihal penyampaian RUU pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi
- 11) Surat Presiden RI kepada DPR RI nomor R.08/PU/111/2001 perihal 12 rancangan di undang-undang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi
- 12) Arsip Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah RI mengenai penjelasan pemerintah atas pembentukan rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi
- 13) Surat Sekjen dengan nomor PW.001/2531/DPR RI/2001. Perihal nama-nama juru bicara pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2001
- 14) Arsip laporan komisi II DPR RI pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2001
- 15) Arsip pendapat akhir Fraksi PDIP terhadap RUU pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi tanggal 28 Mei 2001
- 16) Arsip Sambutan Mendagri pada pembicaraan Pengambilan keputusan RUU
- 17) Surat Keputusan DPR RI dengan nomor 49/DPR-RI/IV /2000-2001 mengenai Persetujuan DPR RI mengenai 12 Rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi
- 18) Surat DPR RI yang ditujukan kepada presiden dengan nomor RU.01/2541/DPR-RI/2001 mengenai persetujuan DPR RI terhadap 12 rancangan undang-undang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi
- 19) Arsip draft final rancangan undang-undang pembentukan kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh DPR RI
- 20) Arsip rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dan otonomi daerah

b. Sumber sekunder

1. Jurnal dan Buku

- 1) Falah, Miftahul. "Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942." *Uga tatar Sunda Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat* (2010).
- 2) Agus Budiman, Ryan Ardiansyah. "Perpindahan Ibukota Kabupaten dari Sukapura ke Manonjaya serta Dampaknya (1828-1834) Jurnal Artefak
- 3) Falah Miftahul, Nina Herlina L, Kunto Sofianto. "Morfologi Kota-kota di Priangan Timur pada Abad ke XX-XXI; Studi Kasus Kota Garut, Ciamis dan Tasikmalaya" *Jurnal Patanjala* Vol. 9 No. 1 Maret 2017
- 4) Ilham Daeng Makkelo. "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historis dan Tematis" *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 12 No. 2 Oktober 2017

2. Sumber Dokumen / Transkrip wawancara

- 1) Transkrip wawancara dengan H. Mahpudin Noor beliau ini selaku tim dari kelompok kerja pembentukan kota Tasikmalaya
- 2) Transkrip wawancara dengan H. Tatang Farhanul Hakim beliau bupati pada tahun 2001-2006 dan pernah menjadi Anggota DPRD Tasikmalaya. Wawancara ini dilakukan oleh tim dari Dipusipda Kota Tasikmalaya.
- 3) Transkrip wawancara dengan Bapak Heri Hendriyana selaku Ketua Pansus pembentukan Kota Tasikmalaya. Wawancara ini dilakukan oleh tim dari Dipusipda kota Tasikmalaya.
- 4) Transkrip dengan Kolonel Infanteri H. Suljana Wirata Hadisubrata. Beliau merupakan mantan Bupati yang menjabat pada periode 1996-2001. Wawancara ini dilakukan oleh tim dari Dipusipda Kota Tasikmalaya
- 5) Transkrip dengan Kolonel H. Mudin Sutaryadi beliau merupakan ketua DPRD 1994 dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Tasikmalaya 1993.

2. Kritik

Tahapan yang kedua ialah Kritik sumber. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah tahapan menyeleksi keaslian dan keotentikan sumber yang didapat berdasarkan bentuk, material dan kategori dari data yang didapat, selanjutnya menyeleksi seperti apa apa yang terkandung dalam data yang di temukan agar dapat di Analisa, di pisahkan, dan di kategorikan mana yang paling relevan dan berguna untuk penelitian. Pada tahapan ini di seleksi data tersebut akurat ataupun tidak dari segi isi maupun bentuk sehingga nantinya akan bisa di pertanggung jawabkan.¹⁵

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah metode penyeleksian terhadap sumber sejarah berdasarkan aspek luar yang terdapat pada sumber sejarah. Pada dasarnya kritik eksternal memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi salah satunya ialah, Setiap data atau sumber yang di dapat harus di buktikan bahwa orang yang menulis pada gambar tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, sebagai pembanding maka akan di hadirkan sumber lain sebagai pengujian atas sumber tersebut.

Kritik ekstern ini dipergunakan untuk menganalisis keotentikan sumber baik dari segi fisik, objek material yang ada di dalamnya serta waktu penulisan yang ada di dalam sumber.

1. Sumber Dokumen atau arsip

- 1) File surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tingkat II Tasikmalaya nomor: 130/sk.04-DPRD/1994 mengenai persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kotamadya daerah tingkat II Tasikmalaya.

File ini penulis dapatkan di Dipusipda kota Tasikmalaya. File ini berbentuk PDF serta di dalam surat tersebut ada logo kabupaten Tasikmalaya serta nomor SK. Tulisan yang ada dalam SK tersebut menggunakan font calibri. Tulisan samar-samar agak sedikit buram namun masih terbaca dengan jelas.

¹⁵ Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah; Teori, Metode, Dan Contoh Aplikasi, Metodologi Penelitian Sejarah, 2014. Hal 101-104

- 2) Surat dari Gubernur kepada DPRD tingkat I Jawa Barat dengan nomor 130/1225/otda mengenai persetujuan dewan dalam rangka usul pembentukan Kotamadya dati II Tasikmalaya

File ini penulis dapatkan di Dipusipda kota Tasikmalaya. Seperti surat-surat pada umumnya surat ini berisi kop Gubernur Jawa Barat, nomor surat, lampiran, perihal serta tanggal dan tahun dibuatnya surat. Surat ini menggunakan font arial ukuran 12 (dua belas) tulisanya sedikit samar dan buram namun masih bisa terbaca dengan jelas.

- 3) Keputusan DPRD propinsi dati I Jawa Barat nomor: 130/sk-10/DPRD/1994 tentang persetujuan pembentukan Kotamadya dati II Tasikmalaya

File ini penulis dapatkan dari tempat yang sama yaitu dari Dipusipda kota Tasikmalaya dan berbentuk PDF. Di Dalam SK ini terdapat logo provinsi Jawa Barat dan juga nomor surat serta tulisan ini menggunakan font calibri ukuran 12 (duabelas). Untuk tulisanya sendiri surat ini masih bisa terbaca dengan sangat jelas.

- 4) Surat dari Bupati Tasikmalaya kepada ketua DPRD Tasikmalaya yang berisi mengenai permohonan penataan kota Tasikmalaya dengan nomor surat 130/142/Tapem 31 Januari 2000

File ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya berbentuk Pdf. Didalam surat ini menggunakan logo burung Garuda dengan tulisan Bupati Tasikmalaya di bawah logo, serta surat ini seperti surat pada umumnya ada nomor surat, lampiran, perihal, serta tanggal dan tahun dibuatnya surat. Surat ini menggunakan font Times New Roman ukuran 12 serta tulisanya masih terbaca dengan sangat jelas.

- 5) Surat Keputusan DPRD kabupaten Tasikmalaya mengenai persetujuan penataan kabupaten Tasikmalaya dengan nomor 3 tahun 2000

File ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya berbentuk Pdf. Surat keputusan ini terdapat logo dari kabupaten Tasikmalaya lengkap dengan nomor dan tahun dibuatnya. Surat ini menggunakan font Times New Roman ukuran 12. Dalam tulisanya surat ini agak sedikit buram namun tulisanya masih terbaca dengan sangat jelas.

- 6) Keputusan bersama Bupati dan pimpinan DPRD kabupaten Tasikmalaya dengan nomor 131/KEP 194. TAPEM/ 2000

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya. Berbeda dengan surat arsip ini tidak menggunakan logo didalamnya namun ada keterangan nomor arsip dan nomor tanggal tahun dibuatnya arsip tersebut. Arsip ini menggunakan font Times New Roman ukuran 12 serta tulisanya masih terbaca dengan sangat jelas.

- 7) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat mengenai usul penataan kota daerah otonom menjadi kabupaten dan kota dengan nomor surat 135.1/1032/Tapem tahun 2000

File ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Surat ini berisi nomo surat, perihal, lampiran serta tanggal dan tahun surat ini di buat. Surat ini menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 serta tulisanya masih terbaca dengan sangat jelas.

- 8) Surat Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada MENDAGRI mengenai usul peningkatan status kota Administratif menjadi daerah Kota dengan nomor surat 135.1/1918/ctda tahun 2000

File ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Surat ini berisi nomo surat, perihal, lampiran serta tanggal dan tahun surat ini di buat. Selain itu juga terdapat logo garuda yang dibawahnya terdapat tulisan gubernur Jawa Barat Surat ini menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 serta tulisanya masih terbaca dengan sangat jelas.

- 9) SK DPRD Jawa Barat mengenai persetujuan pembentukan kota Tasikmalaya dengan nomor 135.1/kep.DPRD 31/2000

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya. Berbeda dengan surat arsip ini menggunakan logo didalamnya namun ada keterangan nomor arsip dan nomor tanggal tahun dibuatnya arsip tersebut. Arsip ini menggunakan font Times New Roman ukuran 12 beserta tulisanya agak sedikit buram namun masih terbaca dengan sangat jelas.

- 10) Surat Sekjen DPR RI kepada anggota DPR RI dengan nomor surat RU.01/1724/DPR RI/2001 perihal penyampaian RUU pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf, serta terdapat logo garuda yang dibawahnya terdapat tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Didalam surat ini juga terdapat nomor surat, perihal, lampiran serta tanggal dan tahun dibuatnya surat ini. Untuk tulisanya sendiri surat ini menggunakan tulisan Times New Roman ukuran 12 beserta tulisanya masih sangat jelas dan terbaca.

- 11) Surat Presiden RI kepada DPR RI nomor R.08/PU/111/2001 perihal 12 rancangan di undang-undang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf serta terdapat logo garuda di samping kiri surat serta logo bintang yang dikelilingi tumbuhan dan juga di bawah logo bintang terdapat tulisan Presiden Republik Indonesia. Surat ini seperti surat pada umumnya terdapat nomor surat, perihal, lampiran serta tanggal dan tahun dibuatnya. Surat ini menggunakan font Arial ukuran 12 dan tulisanya sedikit agak buram namun masih bisa terbaca dengan sangat jelas.

- 12) Arsip Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah RI mengenai penjelasan pemerintah atas pembentukan rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Di Dalam arsip ini terdapat logo garuda yang dibawahnya ada tulisan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia. File arsip ini dilengkapi dengan nomor dan tahun dibuatnya serta menggunakan font arial ukuran 12 dan tulisanya masih bisa dibaca dengan jelas.

- 13) Surat Sekjen dengan nomor PW.001/2531/DPR RI/2001. Perihal nama-nama juru bicara pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2001

File surat ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf, serta terdapat logo garuda yang dibawahnya

terdapat tulisan Sekretariat Jenderal DPR RI. Didalam surat ini juga terdapat nomor surat, perihal, lampiran, derajat serta tanggal dan tahun dibuatnya surat ini. Untuk tulisanya sendiri surat ini menggunakan tulisan Times New Roman ukuran 12 serta tulisanya masih sangat jelas dan terbaca.

- 14) Arsip laporan komisi II DPR RI pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2001

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Di Dalam arsip ini terdapat logo garuda yang dibawahnya ada tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. File arsip ini dilengkapi dengan tahun dibuatnya serta menggunakan font arial ukuran 12 dan tulisanya masih bisa dibaca dengan jelas.

- 15) Arsip pendapat akhir Fraksi PDIP terhadap RUU pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi tanggal 28 Mei 2001

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Di Dalam arsip ini terdapat logo DPR RI dibagian kiri serta logo partai PDIP di bagian kanan arsip. File arsip ini dilengkapi dengan tanggal dan tahun dibuatnya serta menggunakan font arial ukuran 12 dan tulisanya masih bisa dibaca dengan jelas.

- 16) Arsip Sambutan Mendagri pada pembicaraan Pengambilan keputusan RUU

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Di Dalam arsip ini terdapat logo garuda yang dibawahnya ada tulisan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia. File arsip ini dilengkapi dengan nomor dan tahun dibuatnya serta menggunakan font arial ukuran 12 dan tulisanya masih bisa dibaca dengan jelas.

- 17) Surat Keputusan DPR RI dengan nomor 49/DPR-RI/IV /2000-2001 mengenai Persetujuan DPR RI mengenai 12 Rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf, serta terdapat logo garuda yang dibawahnya terdapat tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Didalam surat ini juga terdapat nomor surat. Untuk tulisanya sendiri

surat ini menggunakan tulisan Times New Roman ukuran 12 beserta tulisannya masih sangat jelas dan terbaca.

- 18) Surat DPR RI yang ditujukan kepada presiden dengan nomor RU.01/2541/DPR-RI/2001 mengenai persetujuan DPR RI terhadap 12 rancangan undang-undang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf, serta terdapat logo garuda yang dibawahnya terdapat tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Didalam surat ini juga terdapat nomor surat, perihal, lampiran, derajat serta tanggal dan tahun dibuatnya surat ini. Untuk tulisannya sendiri surat ini menggunakan tulisan Times New Roman ukuran 12 beserta tulisannya masih sangat jelas dan terbaca.

- 19) Arsip draft final rancangan undang-undang pembentukan kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh DPR RI

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Di Dalam arsip ini terdapat logo garuda yang dibawahnya ada tulisan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. File arsip menggunakan font arial ukuran 12 dan tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas.

- 20) Arsip rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dan otonomi daerah

File arsip ini penulis dapatkan dari Dipusipda kota Tasikmalaya dengan berbentuk Pdf. Di Dalam arsip ini terdapat logo garuda yang dibawahnya ada tulisan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia. File arsip ini dilengkapi dengan nomor dan tahun dibuatnya serta menggunakan font arial ukuran 12 dan tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas.

b. Kritik Internal

Kritik internal merupakan kritik sumber yang lebih mengedepankan kritik pada isi sumber yang ditemukan. Selepas di seleksi objek materialnya pada kritik eksternal maka di selanjutnya di uji isi dari sumber yang didapat

serta memutuskan apakah sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pada kritik internal ada tiga hal yang perlu kiranya dilakukan Pertama menganalisis apakah sumber tersebut memenuhi standar atau tidak.

Kedua, berkenaan dengan pelaku sejarah apakah bersedia memberikan kesaksian atau tidak. Ketiga, Penelusuran sumber yang berkaitan dengan sumber utama. Selepas data yang di dapat dianalisis dan dikritik selanjutnya data yang di temukan tersebut dinamakan fakta sejarah. Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian terhadap sumber yang didapat dan meninjau dari segi materi yang terkandung dalam sumber baik sumber primer dan sekunder. Selanjutnya dari sumber yang di dapat ini di seleksi, terutama tentang informasi yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangat penting dilakukan karena bisa saja informasi yang didapatkan memihak salah satu Lembaga ataupun memihak kepada negara.¹⁶

Proses kritik kemudian analisis yang digunakan terhadap sumber ini sangat penting sekali karena dari sini penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga pada nantinya penulis dapat mempertanggungjawabkan data data yang diperoleh dalam penulisan skripsi.

1. Sumber Dokumen atau Arsip

- 1) Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tingkat II Tasikmalaya nomor: 130/sk.04-DPRD/1994 mengenai persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kotamadya daerah tingkat II Tasikmalaya

File tersebut berisi mengenai surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD kabupaten Tasikmalaya, yang mana surat ini juga menjadi jawaban kepada bupati Tasikmalaya. Sebelum dikeluarkannya surat ini bupati Tasikmalaya memberikan surat permohonan terlebih dahulu kepada Dprd kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya DPRD kabupaten Tasikmalaya menyetujui permohonan peningkatan status kota Administratif menjadi kotamadya.

- 2) Surat dari Gubernur kepada DPRD tingkat I Jawa Barat dengan nomor 130/1225/otda mengenai persetujuan dewan dalam rangka usul pembentukan Kotamadya dati II Tasikmalaya

¹⁶ H Sjamsuddin and Penerbit Ombak, Metodologi Sejarah (Penerbit Ombak, 2020),

File surat ini berisi mengenai persetujuan dari Gubernur Jawa Barat pada saat itu mengenai pembentukan kotamadya Tasikmalaya. Surat ini ditujukan kepada DPRD Jawa Barat guna menyetujui pembentukan kota Tasikmalaya. Yang mana persetujuan dukungan dari DPRD Jawa Barat ini juga sebagai usul dan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri dalam mempersiapkan undang-undang pembentukan kotamadya Dati II.

- 3) Keputusan DPRD propinsi dati I Jawa Barat nomor: 130/sk-10/DPRD/1994 tentang persetujuan pembentukan Kotamadya dati II Tasikmalaya

File surat ini berisi mengenai hasil rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang mana surat ini sebagai jawaban dari surat yang diberikan Gubernur pada saat itu. Hasil keputusan tersebut dari surat tersebut adalah DPRD Jawa barat menyetujui perihal pembentukan kotamadya Tasikmalaya.

- 4) Surat dari Bupati Tasikmalaya kepada ketua DPRD Tasikmalaya yang berisi mengenai permohonan penataan kota Tasikmalaya dengan no surat 130/142/Tapem 31 Januari 2000

Di Dalam file tersebut merupakan surat yang dilayangkan oleh bupati kepada ketua DPRD kabupaten Tasikmalaya perihal permohonan pembahasan usulan penataan kabupaten Tasikmalaya.

- 5) Surat Keputusan DPRD kabupaten Tasikmalaya mengenai persetujuan penataan kabupaten Tasikmalaya dengan nomor 3 tahun 2000

File tersebut merupakan hasil keputusan Dprd kabupaten Tasikmalaya. keputusan persetujuan penataan kabupaten Tasikmalaya ini sebagai respon dari surat yang dilayangkan Bupati Tasikmalaya mengenai usulan penataan kabupaten Tasikmalaya menjadi dua daerah otonom. Dalam hasil keputusan tersebut DPRD kabupaten Tasikmalaya menyetujui perihal penataan kabupaten Tasikmalaya menjadi dua daerah otonom yaitu kabupaten dan kota Tasikmalaya.

- 6) Keputusan bersama Bupati dan pimpinan DPRD kabupaten Tasikmalaya dengan nomor 131/KEP 194. TAPEM/ 2000

File arsip ini berisi mengenai keputusan bersama Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Tasikmalaya. Didalam

keputusan tersebut menetapkan tim sukses peningkatan status kota Administratif menjadi daerah kota Tasikmalaya. Tim sukses ini terdiri dari tokoh masyarakat dari kabupaten Tasikmalaya.

- 7) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat mengenai usul penataan kota daerah otonom menjadi kabupaten dan kota dengan nomor surat 135.1/1302/Tapem tahun 2000

File surat ini berisi mengenai usulan dari Bupati Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa barat untuk penataan kabupaten Tasikmalaya menjadi 2 daerah otonom yaitu kabupaten dan kota Tasikmalaya. didalam surat ini terdapat dasar-dasar usulan tersebut setidaknya ada delapan dasar.

- 8) Surat Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada MENDAGRI mengenai usul peningkatan status kota Administratif menjadi daerah Kota dengan nomor surat 135.1/1918/otda tahun 2000

File tersebut berisi mengenai usul peningkatan status kota Administratif menjadi daerah kota yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam isi surat tersebut gubernur Jawa barat sebagai wakil dari pemerintahan Jawa barat mendukung penuh dan menyetujui usulan dari bupati kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertera dalam surat bupati dengan nomor surat 135.1/1302/Tapem tahun 2000. Persetujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan.

- 9) SK DPRD Jawa Barat mengenai persetujuan pembentukan kota Tasikmalaya dengan nomor 135.1/kep.DPRD 31/2000

File surat tersebut berisi keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa barat. File tersebut merupakan respon dari surat yang dilayangkan gubernur Jawa barat dengan nomor surat 135.1/1403 Otda. Hasil dari keputusan tersebut adalah DPRD provinsi Jawa barat menyetujui pembentukan kota Tasikmalaya

- 10) Surat Sekjen DPR RI kepada anggota DPR RI dengan nomor surat RU.01/1724/DPR RI/2001 perihal penyampaian RUU pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat tersebut dikeluarkan oleh Sekjen DPR RI yang ditujukan kepada anggota DPR RI perihal penyampaian RUU pembentukan kota di delapan wilayah provinsi. Dalam surat tersebut terdapat delapan kota yang akan dibentuk di provinsi yang berbeda-beda.

- 11) Surat Presiden RI kepada DPR RI nomor R.08/PU/111/2001 perihal 12 rancangan di undang-undang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat ini merupakan surat perintah yang ditujukan kepada DPR RI perihal pembahasan 12 Rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah provinsi. Yang mana presiden memandatkan tugas pembahasan RUU ini Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai perwakilan pemerintah.

- 12) Arsip Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah RI mengenai penjelasan pemerintah atas pembentukan rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File arsip ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Arsip ini merupakan penjelasan dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengenai 12 rancangan undang-undang pembentukan kota. Di Dalam arsip ini dijelaskan juga bagaimana pemerintah mempertimbangkan RUU ini.

- 13) Surat Sekjen dengan nomor PW.001/2531/DPR RI/2001. Perihal nama-nama juru bicara pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2001

File surat ini berisi mengenai nama-nama juru bicara pada rapat paripurna DPR RI. Surat ini berisi mengenai siapa saja yang akan menjadi juru bicara serta tugasnya di dalam rapat paripurna nantinya.

- 14) Arsip laporan komisi II DPR RI pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2001

Arsip ini berisi mengenai laporan mengenai rapat yang dilaksanakan oleh komisi II DPR RI. Arsip laporan ini dikeluarkan dalam rangka pembicaraan pengambilan keputusan terhadap 12 rancangan undang-undang pembentukan kota di 8 wilayah provinsi.

- 15) Arsip pendapat akhir Fraksi PDIP terhadap RUU pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi tanggal 28 Mei 2001

- 16) Arsip Sambutan Mendagri pada pembicaraan Pengambilan keputusan RUU

Arsip ini merupakan arsip yang berisi mengenai sambutan yang disampaikan Mendagri serta hasil keputusan dari 12 RUU pembentukan kota di 8 wilayah provinsi yang berbeda-beda. Yang mana hasil keputusan dari RUU ini disetujui. Dengan demikian RUU ini sudah sah menjadi undang-undang.

- 17) Arsip Keputusan DPR RI dengan nomor 49/DPR-RI/IV /2000-2001 mengenai Persetujuan DPR RI mengenai 12 Rancangan undang-undang tentang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

Arsip ini berisi mengenai hasil keputusan dari DPR RI mengenai RUU pembentukan kota. Hasil dari keputusan tersebut adalah DPR RI menyetujui 12 Rancangan undang-undang pembentukan kota di 8 wilayah provinsi.

- 18) Surat DPR RI yang ditujukan kepada presiden dengan nomor RU.01/2541/DPR-RI/2001 mengenai persetujuan DPR RI terhadap 12 rancangan undang-undang pembentukan kota di delapan wilayah Provinsi

File surat ini merupakan hasil dari rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPR RI mengenai 12 RUU pembentukan kota. Surat ini berisi laporan persetujuan DPR RI terhadap 12 RUU pembentukan kota sehingga RUU tersebut telah sah menjadi Undang-undang. Surat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI yang menerima mandat dari Presiden dalam membahas RUU tersebut.

- 19) Arsip draft final rancangan undang-undang pembentukan kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh DPR RI

- 20) Arsip ini berupa draft final dari undang-undang yang disetujui dalam rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPR RI. Draft final Undang-undang ini sebagai hasil akhir dari proses panjang dari rapat paripurna yang telah dilaksanakan.

Arsip ini berupa draft final dari undang-undang yang disetujui dalam rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPR RI. Draft final Undang-undang ini sebagai hasil akhir dari proses panjang dari rapat paripurna yang telah dilaksanakan.

21) Arsip rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dan otonomi daerah

Arsip ini berupa draft final dari undang-undang yang disetujui dalam rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPR RI. Draft final Undang-undang ini sebagai hasil akhir dari proses panjang dari rapat paripurna yang telah dilaksanakan.

3. Interpretasi

Pada tahapan ini seringkali disebut dengan analisis sejarah, yakni penyatuan fakta-fakta yang di dapat. Tujuan dari penganalisisan ini yakni penafsiran terhadap fakta-fakta yang di dapat. Selanjutnya sumber sumber dan fakta tersebut di padukan dengan teori teori sejarah kemudian direkonstruksi selepas itu diinterpretasi dengan menyeluruh.¹⁷

Tahapan ini merupakan tahapan puncak dari seluruh rangkaian aktivitas penelitian sejarah hal ini dikarenakan suatu permasalahan merupakan pusat dan arah dari kegiatan penelitian sejarah. Pada hakikatnya interpretasi merupakan proses dalam memecahkan permasalahan melalui pemahaman fakta- fakta atau bukti-bukti sejarah yang sebelumnya telah berhasil dihimpun dalam proses heuristik dan telah diseleksi serta diuji kebenarannya dalam proses kritik ekstern dan kritik internal. Singkatnya, interpretasi merupakan proses yang melibatkan berbagai kegiatan.

Pada tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap data-data yang didapat baik sumber primer maupun sumber sekunder. Data data yang didapatkan kemudian dihubungkan satu sama lain, kemudian direkonstruksi untuk mendapatkan fakta dari kajian terhadap masalah yang di dapat. Penafsiran hasil dari fakta-fakta tersebut seringkali bersifat subjektif. Oleh karena itu dalam penafsiran fakta-fakta inilah penulis menggunakan teori birokrasi rasional-legal oleh Max weber.

Dalam tahap interpretasi, teori birokrasi rasional Max Weber bisa membantu kita memahami bagaimana Kota Tasikmalaya mengalami perubahan status dari kota Administratif menjadi kotamadya antara tahun 1993 hingga 2007. Menurut Weber, birokrasi modern berjalan berdasarkan aturan legal-rasional yang

¹⁷ Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah; Teori, Metode, Dan Contoh Aplikasi. Hal 115

memiliki ciri utama seperti aturan yang jelas, pembagian tugas yang teratur, struktur kekuasaan yang hierarkis, pegawai yang profesional, serta penggunaan dokumen resmi yang rapi.¹⁸

Jika kita hubungkan dengan kasus Tasikmalaya, meningkatnya status menjadi kotamadya menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun sistem tata kelola yang lebih teratur dan sah secara hukum. Perubahan ini terlihat, misalnya, dengan munculnya perangkat birokrasi baru yang memiliki pembagian tugas yang lebih jelas, serta posisi walikota definitif yang memiliki otoritas penuh, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Hal ini mencerminkan kemajuan struktur birokrasi yang sesuai dengan prinsip yang dijelaskan Weber. Selain itu, kebutuhan akan pegawai yang lebih terampil dan perhatian terhadap penataan arsip serta dokumen resmi menunjukkan bagaimana birokrasi kota diarahkan untuk lebih profesional dan lebih tertib dalam urusan administrasinya. Jadi, jika kita melihat peristiwa ini melalui perspektif Weber, perubahan status Kota Tasikmalaya bukan hanya soal urusan administrasi biasa, tetapi juga bagian dari usaha untuk rasionalisasi birokrasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pada tahapan ini penulis berusaha memecah dan menafsirkan setiap fakta fakta yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang selaras dengan penelitian ini. Setiap fakta-fakta yang didapat oleh penulis dari sumber primer kemudian diselaraskan dengan fakta-fakta lain yang didapatkan dari sumber sekunder dan dari beberapa tulisan di internet. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam mengantisipasi sebagian data yang didapat agar tidak menyimpang. Setelah data dan fakta yang di dapat diterima dan dihubungkan dengan fakta lainnya maka rangkaian fakta fakta tersebut diharapkan menjadi sebuah rekonstruksi yang menjelaskan mengenai sejarah perubahan kota Tasikmalaya

4. Historiografi

Tahapan Historiografi yakni langkah terakhir yaitu menuliskan hasil penelitian yang dilakukan serta berusaha merekonstruksi peristiwa masa lalu guna memberi jawaban terhadap permasalahan yang diangkat selepas menggabungkan

¹⁸ Abdul Kadir, "Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara," JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik v. 1, no. 1 (2015).

sumber sumber yang didapat pada tahapan awal yakni heuristik. Berangkat dari hal ini dapat disebut bahwa tahapan historiografi adalah tahapan terakhir dalam penelitian sejarah yakni menuangkan hasil penelitian dalam sebuah laporan penelitian yang diharapkan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang.

BAB I Pada bagian ini yakni Pendahuluan yang terdiri dari: (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian pustaka, metode Penelitian).

BAB II Pada bagian ini berisi mengenai bagaimana kondisi kota Tasikmalaya sebelum menjadi kota madya

BAB III Pada bagian ini membahas mengenai Dinamika perubahan Kota Tasikmalaya dari kota Administratif menjadi kotamadya tahun 1993-2007.

BAB IV Pada bagian ini merupakan tahapan terakhir dari pembahasan yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG